

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

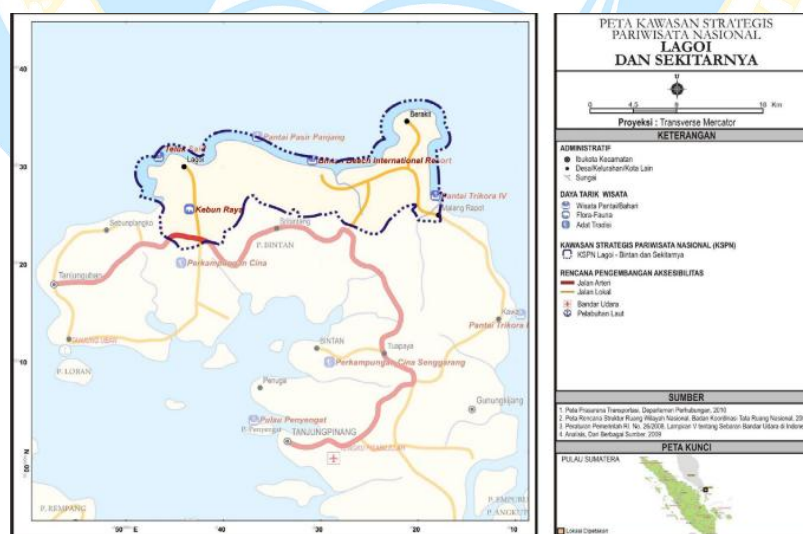
Indonesia mempunyai banyak sekali objek wisata yang terkenal sampai keluar negeri, baik objek wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan, oleh karena itu pariwisata di Indonesia perlu di kembangkan. Pariwisata menurut (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan) pasal 1 ayat (3) adalah semua hal yang berkaitan dengan wisata dan juga usaha – usaha yang berkaitan dibidang tertentu. Pariwisata berkaitan juga dengan konsep perjalanan wisata, yang menyatakan pada perjalana sementara seseorang dari luar tempat tinggalnya yang bertujuan untuk liburan, relaksi dan mendapatkan pengalaman baru. Pariwisata tidak hanya tentang perjalanan, melainkan juga kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan pengetahuan dan kemampuan yang kreatif. Hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan dari ide kreatif dalam pengelolaan potensi wisata yang ada.

Pariwisata Indonesia mempunyai potensi yang bagus serta menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara, oleh karena itu, perlu untuk merencanakan industri ini menjadi sektor yang unggul (Yakup & Haryanto, 2019). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam

pembangunan nasional. oleh sebab itu, perlu melibatkan pelaku wisata, proses pengelolaan wisata, kebijakan, politik dan sosial budaya yang memiliki keterlibatan (Amri et al., 2022).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010 – 2025 meliputi : visi, misi, tujuan, sasaran dan arah dalam pembangunan pariwisata nasional (PP No 50 Tahun 2011). Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan peningkatan pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan juga pertahanan negara. Indonesia memiliki 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, salah satunya yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lagoi dan Sekitarnya (Daftar 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).

Gambar 1.1 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lagoi



Sumber : (Lampiran III PP No 50 Tahun 2011)

Berdasarkan peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lagoi dan sekitarnya, dengan wilayahnya mencakup destinasi wisata Lagoi, Pengudang, Berakit dan Sebagian Pantai Trikora. Destinasi wisata Pantai Trikora menjadi salah satu wisata yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lagoi dan sekitarnya. Pantai Trikora menjadi salah satu destinasi yang mempunyai kemampuan wisata menarik untuk dikembangkan sebagai pariwisata daerah. Pantai Trikora terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pantai Trikora memiliki panorama yang sangat indah, dengan pasir putih disepanjang garis pantai dan air laut yang jernih memanjakan mata. Selain itu, Pantai Trikora juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati seperti, ekosistem karang, mangrove, dan lamun (Mukhlis et al., 2024).

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kabupaten Bintan yang meliputi kawasan Lagoi dan sekitarnya berkontribusi pada tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional, hal ini menggambarkan tingkat daya tarik wisatawan. Berikut data kunjungan wisatawan kawasan wisata Lagoi, Pantai Trikora KM 50, dan Pantai Trikora KM 52.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Lagoi, Pantai KM 50 dan KM 52

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kawasan Wisata Lagoi, Pantai KM 50, dan KM 52				
No	Tahun	Lagoi	KM 50	KM 52
1.	2022	383.819 orang	696 orang	2.105 orang
2.	2023	510.459 orang	228 orang	898 orang
3.	2024	512.276 orang	318 orang	5.273 orang
4.	2025	625.385 orang	241 orang	10.145 orang

Sumber : (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, 2026)

Berdasarkan data jumlah kunjungan pada tabel diatas, terlihat perbedaan yang signifikan antara jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Lagoi, Pantai Trikora KM 50 dan Pantai Trikora KM 52. Jumlah kunjungan wisatawan di Lagoi termasuk tinggi dengan kunjungan 1.406.554 orang. Selanjutnya, jumlah kunjungan di Pantai Trikora KM 50 termasuk rendah dengan jumlah 1.483 orang. Terakhir, jumlah kunjungan wisatawan di Pantai KM 52 dengan jumlah 18.421 orang. Perbedaan jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan adanya cara yang berbeda dalam pengelolaan yang meliputi, aksesibilitas yang baik, fasilitas yang memadai dan juga keterlibatan aktor kepentingan.

Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Bintan memiliki target berupa penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Berikut target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah retribusi sektor pariwisata tahun 2022 – 2025.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan			
No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2022	Rp 60.420.000,00	Rp 47.022.000,00
2.	2023	Rp 148.252.000,00	Rp 99.597.000,00
3.	2024	Rp 89.412.000	Rp 72.122.000,00
4.	2025	Rp 91.620.000	Rp 100.788.000,00

Sumber : (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, 2026)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah pada tabel diatas, pada tahun 2022 target sebesar Rp60.420.000 dengan realisasi Rp47.022.000. Tahun 2023 target meningkat menjadi Rp148.252.000 dengan realisasi Rp99.597.000. Tahun 2024 target sebesar Rp89.412.000 dengan realisasi Rp72.122.000. Sedangkan pada tahun 2025 target Rp91.620.000 dan realisasi Rp100.788.000

yang berhasil melampaui target. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada tahun tertentu, capaian retribusi pariwisata belum sepenuhnya stabil dan konsisten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal agar mampu berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Selain adanya kesenjangan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lagoi dan sekitarnya, Pantai trikora juga terdapat permasalahan berupa infrastruktur yang belum memadai, akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Trikora beberapa masih mengalami kerusakan. Kemudian permasalahan lingkungan, seperti sampah laut dan minyak hitam yang datang akibat dari musim utara.

Pengelolaan destinasi wisata Pantai Trikora sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tidak dilakukan oleh satu aktor saja, tetapi memerlukan keterlibatan aktor lain yang memiliki peran dan kepentingan yang sama. Permasalahan dari pengelolaan destinasi wisata Pantai Trikora sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menuntut pemerintah daerah melakukan pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan *collaborative governance* yang dinyatakan oleh Ansell dan Gash (Utami et al., 2021) merupakan proses kerjasama dalam mencapai suatu keputusan yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan publik yang melibatkan beberapa instansi publik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung kolaborasi dari pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta dan juga masyarakat.

Tabel 1.3 Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Trikora

No	Stakeholder	Pelaku	Peran
1.	Pemerintah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	Sebagai regulator dan fasilitator dalam proses kolaborasi
2.	Swasta	Pelaku Usaha Pariwisata	Sebagai penyedia layanan dan investor
3.	Masyarakat	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Sebagai penggerak partisipasi masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

Penelitian dari (Putri et al., 2024) berjudul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, masih terdapat permasalahan yaitu adanya dominasi dari pihak masyarakat, masih adanya kolaborasi tanpa kerja sama tertulis, serta sumber daya manusia dan keuangan yang belum memadai. Selanjutnya, penelitian dari (Husna et al., 2025) dengan judul Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil dari penelitian ini partisipasi para aktor dalam kolaborasi belum optimal, ditunjukkan dengan Pokdarwis yang kurang mamahami dalam mengelola desanya, selanjutnya kurangnya koordinasi antar aktor sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman yang menghambat pembentukan visi bersama.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* dalam lingkup pengelolaan pariwisata sudah banyak di teliti. Namun, masih berfokus pada destinasi desa wisata. Sementara penelitian yang

secara spesifik mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata pesisir dengan kondisi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu di isi. Oleh karena itu, peneliti menarik melakukan penelitian berjudul “ ***Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Trikora Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional***”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *colaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Trikora sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Trikora sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengembangan wawasan keilmuan ilmu administrasi Negara secara umum dan diharapkan mampu memberi kontribusi dalam

kajian tata kelola dan *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Pantai Trikora.

2. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perlunya kerjasama yang baik, antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan menguntungkan

3. Bagi Masyarakat Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat dalam hal peranan dan posisi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Trikora.